

IV. PENINGKATAN PENYULUHAN KHUSUSNYA MENGENAI PENGENDALIAN HAMA WERENG DALAM RANGKA TRANSFER TEKNOLOGI.

Oleh

Aida Vitayala Sjafrri Hubeis *)

Untuk mencapai tujuan nasional, REPELITA IV, dicanangkan sistem pertanian tangguh demi keuntungan dan kemakmuran negara. Sistem ini terdiri dari tiga komponen terpadu yaitu, pelayanan komoditi, pengelolaan komoditi, dan umpan balik. Ketiga komponen ini menyediakan data dasar untuk suatu sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya di sektor pertanian (termasuk pemecahan masalah).

Masalah di bidang pertanian yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan orang adalah masalah hama wereng; Dan ini menjadi lebih diperkuat dengan keluarnya SK Presiden nomor 3, tahun 1986. Dilihat dari perjalanan waktu, serangan hama wereng sudah ada sejak lama. Paling tidak pada PELITA II sudah dianggap sebagai salah satu penyebab turunnya produksi per satuan luas dari 4.7 menjadi 3.8 persen per tahun (Deptan, Dirjen Tanaman Pangan, 1983). Berarti informasi tentang adanya serangan tersebut telah tersedia sebagai suatu umpan balik untuk dianalisis dan dicari pemecahan dan pencegahan dini.

Di sini timbul pertanyaan kepada kita mengapa serangan hama wereng tersebut sempat meledak? Padahal misalnya, menurut SK Presiden R.I nomor 62 tahun 1983, dan Surat Edaran Menteri Pertanian nomor 47 tahun 1985, kegiatan penyuluhan Pertanian perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan program pertanian pada umumnya dan pelaksanaan program Bimas (intensifikasi tanaman pangan) pada khususnya agar potensi hasil dapat tercapai semaksimal mungkin. Salah satu bentuk pengendalian faktor-faktor produksi adalah pengendalian hama penyakit, dan diterapkannya konsep pemberantasan terpadu (integrated pest control).

Pengendalian hama penyakit terpadu, pada prinsipnya merupakan kewajiban petani, sehingga keputusan untuk melaksanakan pengendalian harus diambil oleh petani bersangkutan atau oleh kelompok tani dengan bantuan pengamat hama. Apabila timbul eksplosi dimana petani tidak mampu mengatasinya, maka Pemerintah turun tangan memberikan bantuan dalam melaksanakan pengendalian setelah mengevaluasi sifat serangan tersebut. Dalam hal ini Satuan Pembina Bimas/Pelaksana

Bimas dapat memanfaatkan dan mendayagunakan Brigade Proteksi Tanaman yang telah ada bersama Regu Pemberantasan Hama. Bahkan pada tingkat eksplosi yang sudah tidak dapat ditanggulangi Satuan Pembina Bimas harus segera mengajukan permintaan bantuan penyemprotan dari udara kepada Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas.

Apapun tahapan jalur pengendalian hama penyakit, tidak terlepas mekanisme kegiatan operasional penyuluhan yang berbentuk penyusunan program penyuluhan pertanian yang disusun menurut hasil *impact point*. Tentunya masalah-masalah spesifik, termasuk jenis serangan hama, seharusnya juga dapat diliput dari pendapatan *impact point* tersebut. Yang menjadi bahan untuk dipertanyakan adalah, (1) apabila pada prinsipnya pengendalian hama di tahap awal merupakan tugas petani, sejauh mana mereka telah dibekali informasi tentang hal tersebut, dan (2) apabila penyuluh dipandang sebagai ujung tombak, dimana mereka harus melakukan transfer teknologi, apa pun bentuknya, sejauh manakah mereka dibekali oleh fasilitas (fisik dan non-fisik) di dalam melakukan peranan tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kaitannya dengan usaha transfer teknologi, perlu terlebih dahulu dilihat program pembangunan pertanian secara keseluruhan karena adanya saling dukung di antara berbagai elemen di dalamnya.

Sejak PELITA III, program pembangunan pertanian di Indonesia dilakukan melalui tiga macam pendekatan yaitu pendekatan komoditi, pendekatan wilayah, dan pendekatan usahatani (SK Menteri Pertanian nomor 09/SK Mentan/Bimas/VII/1984).

1) pendekatan komoditi dilakukan dengan memperhatikan tiga kriteria yaitu komoditi yang mendapat prioritas di dalam REPELITA, keikutsertaan petani harus massal dan partisipasi petani karena mendambakan insentif ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dari beragam komoditi dengan secara tepat dan seimbang, baik produksi dan pengolahan maupun pemasaran.

2) pendekatan wilayah dilakukan untuk memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam yang terbatas yang terdapat di suatu daerah, yang karena kondisi lingku-

*) Staf Pengajar Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian IPB, Bogor.

ngannya tidak atau belum terjangkau oleh program komoditi prioritas, melalui berbagai pengembangan komoditi pertanian yang cocok guna meningkatkan partisipasi daerah tersebut dalam pembangunan.

- 3) pendekatan usahatani dilakukan untuk memanfaatkan secara optimal sumberdaya dan tenaga yang dimiliki oleh kelompok tani dengan mengusahakan aneka cabang usahatani terpadu. Program ini dilakukan oleh petani secara berkelompok.

Strategi pendekatan di atas sejalan dengan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1983 dengan dibentuknya Pusat Penyuluhan Pertanian pada BPLPP serta Direktorat Penyuluhan pada Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pertanian; para direktur bertanggungjawab tentang *apa* yang harus dikerjakan di lapangan, sedang ketua pusat penyuluhan bertanggungjawab tentang bagaimana cara mengerjakan kegiatan penyuluhan dengan baik. Kemudian dengan SK Presiden nomor 62 tahun 1983 disempurnakan organisasi dan tata kerja Badan Pengendali Bimas untuk mengorganisasi dan tata kerja Badan Pengendali Bimas untuk mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan pertanian dengan kegiatan pelayanan saprodi, pelayanan kredit dan penanganan pemasaran hasil-hasil pertanian. Pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan prinsip satu kesatuan dalam penyuluhan pertanian yaitu satu kesatuan aparat penyuluhan pertanian/korps penyuluh, dan satu kesatuan pengertian dalam penyuluhan pertanian (Rapim Deptan, 1984);

Tujuan prinsip satu kesatuan ini adalah untuk menjamin terselenggaranya program-program peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kemampuan pertanian guna memperbaiki taraf hidup petani nelayan dan keluarganya. Penerapan prinsip satu kesatuan dilakukan antara lain melalui pendayagunaan dan penghasilgunaan BIP dan BPP oleh semua unit kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pelaksanaannya diatur dalam ketentuan-ketentuan pengendalian, pembinaan, dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (SE. Mentan LP 120/47/Mentan/1/1985 dan SKB Mendagri dan Mentap nomor 59 tahun 1986);

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan tanggungjawab BPLPP. Pembinaan penyelenggaraan ditekankan pada pengkajian penyuluhan pertanian dan penyusunan pelaksanaan program penyuluhan pertanian sehingga sumberdaya pertanian dapat ditingkatkan kemampuannya. Kontribusi penyuluhan dalam keberhasilan pertanian di Indonesia tidak perlu dipertanyakan; mulai dari sistem Bimas, Inmas, Insus, Inmum, dan sebagainya. Bahkan seringkali dikemukakan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan tugas departemen pertanian di dalam pembangunan menuju pertanian tangguh. Sedang ujung-ujung tombak di tingkat BPP, WKPP dan Wilkel berada pada Penyuluh dan para Kontrak tani dan atau

kontak tani andalan.

Korps penyuluh di dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan terdiri atas 3 komponen yaitu PPS, PPM, dan PPS. Tiap-tiap penyuluh mempunyai tugasnya masing-masing sesuai dengan spesialisasi mereka, pendekatan komoditi, untuk melakukan penyuluhan terpadu. Namun ketidakjelasan hubungan fungsional antar instansi, terlalu banyak peraturan, menimbulkan perbedaan interpretasi siapa bertanggung apa dan untuk siapa, dan akibatnya membatasi lingkup dan dayaguna penyuluhan pertanian. Akibat lain dapat diduga transfer inovasi teknologi atau inovasi sosial akan terhambat. Namun dari sistem yang ada sebenarnya kesenjangan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan sarana komunikasi baik antar penyuluh/instansi atau antar penyuluh dengan petani; misalnya lewat FKPP I (tingkat Propinsi), FKPP II (tingkat Kabupaten), BPP (tingkat Wilud), dan Mimbar Sarasehan di setiap tingkat yang sama. Sejauh ini tampaknya sarana tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Pendayagunaan yang lebih efektif diduga dapat membantu transfer teknologi, apa pun bentuknya. Masalahnya bagaimana caranya?

Di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan para penyuluh (PPS, PPM, PPL) mendapat fasilitas bantuan dan pengujian dan atau bimbingan. Jika dilihat dari volume pekerjaan yang harus mereka lakukan serta lingkup sasaran yang harus dicapai, dapat dikatakan belum memadai. Secara tidak langsung situasi tersebut mempengaruhi lingkup kegiatan penyuluhan yang dapat mereka lakukan, mencakup aspek hubungan fungsional antar sesama penyuluh; misalnya kurang efektifnya fungsi pengalihan teknologi, bimbingan, dan pengawasan. Bahkan kunjungan dari penyuluh ke petani sebagai bagian dari metoda LAKU yang digunakan dalam Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Di lain pihak dilihat dari sudut kelompok tani dikabarkan mulai timbul keengganan untuk hadir dalam pertemuan kelompok dimana salah satu alasan yang dikemukakan adalah informasi yang mereka terima cenderung monoton dan kurang memberi informasi teknologi mutakhir. Kondisi ini pun tidak terlepas dari sistem Latihan kepada para PPL, yang bahkan dapat dikatakan sangat minim dan terbatas setelah mereka menjadi PPL. Tampaknya pembenahan mekanisme penyuluhan sistem LAKU agar terjadi keseimbangan antara LA dan KU perlu dilakukan agar penyuluhan yang dijalankan dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Efektifitas operasionalisasi kelembagaan penyuluhan pertanian, kasus pengendalian hama wereng, antara lain akan dicerminkan oleh penerapan kebijakan *Sistem Kewaspadaan Hama dan Penyakit Tanaman* (SKHPT). Dia merupakan bagian dari subsistem produksi dan pengadaaan pangan nasional. Salah satu usaha yang perlu di-

pikirkan dalam mengisi satu kesatuan dalam penyuluhan pertanian adalah *mekanisme informasi dini*, yaitu bagaimana menumbuhkan dan menggerakkan peranserta petani secara aktif termasuk pula partisipasi masyarakat ilmiah) tentang pengendalian hama (wereng) ataupun informasi teknologi baru yang dapat digunakan. Dalam hal ini pendekatan program pembangunan pertanian/ penyuluhan yang berorientasi pada pendekatan komoditi perlu diimbangi dengan pendekatan sumberdaya manusia.

Agaknya peranan Perguruan Tinggi tidak hanya cukup memberi gagasan dalam seminar tetapi perlu melakukan *kerjasama* dengan BPLPP secara lebih efektif; misalnya di level Nasional berpartisipasi aktif dalam KPPN sebagai Ahli Andalan; Sedang di tingkat daerah,

lewat proyek kerjasama LPPM-IPB dengan Pemda, berpartisipasi aktif dalam proses pemantauan dan evaluasi, misalnya lewat sarana FKPP. Sedang di tingkat lapangan, memunculkan kembali *metoda demplot* sebagai embrio dari demunit yang sekarang digunakan secara massal dalam penyuluhan pertanian tanaman pangan, dalam bentuk *demplot terpadu*, perlu ditampilkan. Tidak hanya untuk mengisi SKHPT, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi aktif petani dan meyakinkan mereka bahwa tidak hanya produksi padi dapat ditingkatkan tetapi juga pengendalian hama penyakit dapat dilakukan sedini mungkin. Peranan aktif dari Perguruan Tinggi yang lebih jauh misalnya, lewat cara *wajib kerja* bagi Sarjana Pertanian setelah lulus di daerah kantong-kantong produksi untuk masa waktu tertentu.

DISKUSI MAKALAH IV

Soenarto: Apabila diadakan pengurangan tanaman padi sawah dalam hubungannya dengan pengendalian hama wereng, alternatif tanaman apa yang dapat dianjurkan kepada petani untuk menggantikan tanaman padi?

Jawab: Para petani dianjurkan untuk melaksanakan pola tanaman berganti-ganti, dengan jenis tanaman yang harus disesuaikan dengan kondisi setempat. PPL dapat menyampaikan anjuran tersebut dengan memberikan penyuluhan kepada petani. Jadi alternatif yang dianjurkan PPL harus memperhatikan kondisi wilayah dimana petani bersangkutan bertempat tinggal

H:dir Sastraatmadja: Mengingat kemampuan migrasi wereng coklat cukup jauh, bagaimanakah pengorganisasian Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dalam hubungannya dengan pengendalian hama wereng coklat?

Jawab: Sebagai ujung tombak di bidang penyuluhan pertanian adalah para penyuluh lapang. Setiap PPL bertugas untuk menangani satu WKPP yang rata-rata terdiri dari 10-16 Wilayah Kelompok (Wilkel) atau 2-4 desa.

Para Penyuluh dalam 1 bulan seharusnya mengunjungi tiap kelompok tani sebanyak dua kali atau 32 kali untuk 16 Wilkel yang ditanganinya. Masalahnya adalah karena PPL harus menangani segala masalah pertanian, fasilitas yang kurang memadai (kurang berfungsi) dan kemampuan/kwalitas PPL yang masih terbatas, maka menurut pengamatan pemrasaran, belum ada PPL yang mampu melaksanakan tugas tersebut. Di samping itu, PPL belum mampu menangani masalah-masalah yang mendesak, seperti halnya kasus hama wereng. Untuk itu selain kemampuan yang telah dimiliki oleh PPL sekarang, mereka perlu dilengkapi dengan disiplin ilmu pertanian yang bersifat lebih luas, disesuaikan dengan kondisi pertanian setempat. Dalam hal ini BIP dan juga instansi lainnya perlu meningkatkan frekuensi dan ragam pelayanan mereka dalam bentuk informasi yang tepat

guna, disajikan dalam bentuk yang dapat diperagakan di depan kelompok tani pada saat PPL berkunjung/melakukan penyuluhan di kelompok tani. Hal ini ada kaitannya dengan banyaknya kelompok tani yang kurang hidup. Dari hasil pengamatan pemrasaran berbagai daerah, hal ini disebabkan para kelompok tani merasa bosan sebab tidak ada atau jarang ada informasi baru yang disampaikan oleh PPL. Hal lain mengapa kelompok tani banyak yang kurang hidup karena para petani kita umumnya bukan hanya petani saja tapi juga kerja yang lain. Akibatnya, di luar musim tanam dan panen mereka jarang mengunjungi suatu tempat bertemu dengan PPL. Menurut para PPL untuk mengatasi hal ini mereka biasanya melakukan kunjungan domisili selain kunjungan ke-hamparan.

Selain itu, untuk mencapai target kunjungan PPL ke kelompok tani sebanyak 32 kali atau 2 x per kelompok per bulan, para PPL perlu dilengkapi dengan sarana transportasi yang memadai, sampai saat ini, hanya sebagian kecil PPL-khususnya mereka yang menangani sektor tanaman pangan (dulunya, sebelum terpadu), yang sudah mempunyai sarana transportasi sendiri, seperti motor. Sedang lainnya, masih berjalan kaki dari satu desa ke desa yang lain.

Dadi:

1. Metode penyuluhan LAKU sebenarnya mempunyai kelemahan-kelemahan karena :
 - a. Para penyuluh (PPS) terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan administrasi.
 - b. Kelompok tani banyak yang kurang hidup. Bagaimanakah untuk mengatasi masalah ini ?
2. Beban penyuluh sebenarnya terlalu berat karena harus menangani berbagai komoditi. Sedang akhir-akhir ini konsentrasi penyuluh hanya pada komoditi padi. Bagaimanakah mengatasinya?

Jawab:

- a. Kesibukan PPL dalam soal administrasi, membuat laporan kegiatan dan sebagainya, dapat diatasi jika para PPL dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sedangkan untuk tingkat BPP, jika rencana menempatkan 6 PPM di tiap BPP sudah dipenuhi, maka pembagian tugas akan lebih baik sehingga PPM tidak terlalu banyak dibebani oleh urusan administrasi. Saat ini rata-rata BPP baru memiliki 2-3 orang PPM yang menangani tugas-tugas yang seyogyanya ditangani oleh orang PPM.
- b. Sudah terjawab pada penanya ke 2.

Goenawan Satari:

1. Pada saat ini sudah ada kerjasama antara Deptan dan Perguruan Tinggi. Bagaimanakah melestarikan hubungan/kerjasama tersebut, karena kendala utamanya adalah masalah biaya?
2. Ada pendapat bahwa pengendalian hama terpadu merupakan kewajiban para petani, sehingga pendapat tsb menyarankan agar petani yang tidak melaksanakan PHT (misalnya petani yang mempunyai sawah dengan populasi wereng di atas ambang ekonomi) harus di denda. Bagaimanakah pendapat pemrasaran?

Jawab:

1. (dijawab oleh Bapak *Soleh Solahuddin*)
Fakultas Pertanian IPB telah menugaskan lima orang mahasiswa tingkat akhir (secara sukarela) untuk melakukan pengamatan hama wereng di Jawa Barat. Untuk mengatasi masalah biaya, maka perlu adanya kerjasama antar Departemen.
2. Penyuluhan pada petani merupakan proses pendidikan kepada orang dewasa sehingga tidak dapat dilakukan secara paksaan. Selain mengajar petani agar dapat melakukan PHT, maka petani sebaiknya juga diberikan subsidi dan bukan dipaksa. Sampai saat ini, pemrasaran sendiri belum pernah mendengar adanya sistem denda tersebut.

Soleh Solahuddin

1. Kualifikasi dan Kualitas PPL masih terbatas. Di samping itu apresiasi tentang PPL masih kurang. Bagaimanakah cara meningkatkan derajat/kedudukan PPL ini?
2. Bagaimanakah metode yang tepat agar PPL dapat menyampaikan pesan-pesan pemerintah agar dapat diterima petani?

Jawab:

1. Untuk meningkatkan derajat/kedudukan PPL, pemerintah telah melakukan berbagai cara. Antara lain, dengan menjadikan PPL sebagai pegawai negeri. Untuk menilai kerja PPL sebagai pegawai negeri saat ini sudah dikembangkan sistem penilaian berdasarkan kredit yang dihitung dari berbagai aspek kegiatan yang dilakukan oleh PPL.

Selain itu menurut hemat pemrasaran. Latihan untuk para PPL juga perlu dilakukan lebih banyak dan lebih lama. Selama ini PPL hanya mengikuti latihan orientasi (\pm 1 bulan) sebelum dia menjadi PPL. Setelah itu boleh dikatakan tidak ada, hanya latihan 2-4 jam tiap 2 minggu sekali di BPP masing-masing. Mungkin perlu dipikirkan untuk melatih atau memberi kesempatan PPL mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan dan kemampuan menyuluh yang lebih canggih. Apabila dengan adanya istilah PPL serba bisa yang dihubungkan dengan kenyataan bahwa petani kita tidak hanya mengusahakan satu komoditi pertanian saja. Menurut para PPL yang pernah diwawancarai oleh pemrasaran, jika mereka dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanian mereka (padi, ternak, ikan dan sebagainya), maka kedudukan PPL dimata petani menjadi lebih baik. Masalahnya sekarang bagaimana menciptakan PPL yang serba bisa dan bentuk latihan/pendidikan apa yang perlu diberikan pada PPL.

2. Metode yang paling baik adalah metode penyuluhan berpartisipasi. Dalam metode ini penyuluh tinggal bersama-sama (dilingkungan) petani, sehingga penyuluh dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi petani. Sampai saat ini, karena penyuluh tidak dapat tinggal disemua lingkungan petani, maka bila penyuluh melakukan kunjungan diterima seperti tamu. Dengan keharusan seorang PPL membina 16 kelompok tani (16 Wilkel) yang biasanya mencakup 2-4 desa, maka PPL biasanya/hanya mungkin memilih untuk tinggal di salah satu desa saja. Akibatnya tidak semua desa dapat dibina secara intensif dan hanya terbatas dikunjungi 1-2 kali per bulan. Idealnya adalah satu PPL untuk satu desa. Sebab jika PPL merupakan bagian dari satu masyarakat desa, tinggal dan bergaul dengan mereka, maka penerimaan PPL sebagai "tamu" dapat dihindari. Hanya masalahnya di sini dibutuhkan jumlah PPL yang lebih banyak, sedang jumlah PPL yang ada saja saat ini masih kurang. Karena itu usaha untuk menambah jumlah PPL harus dilakukan segera.

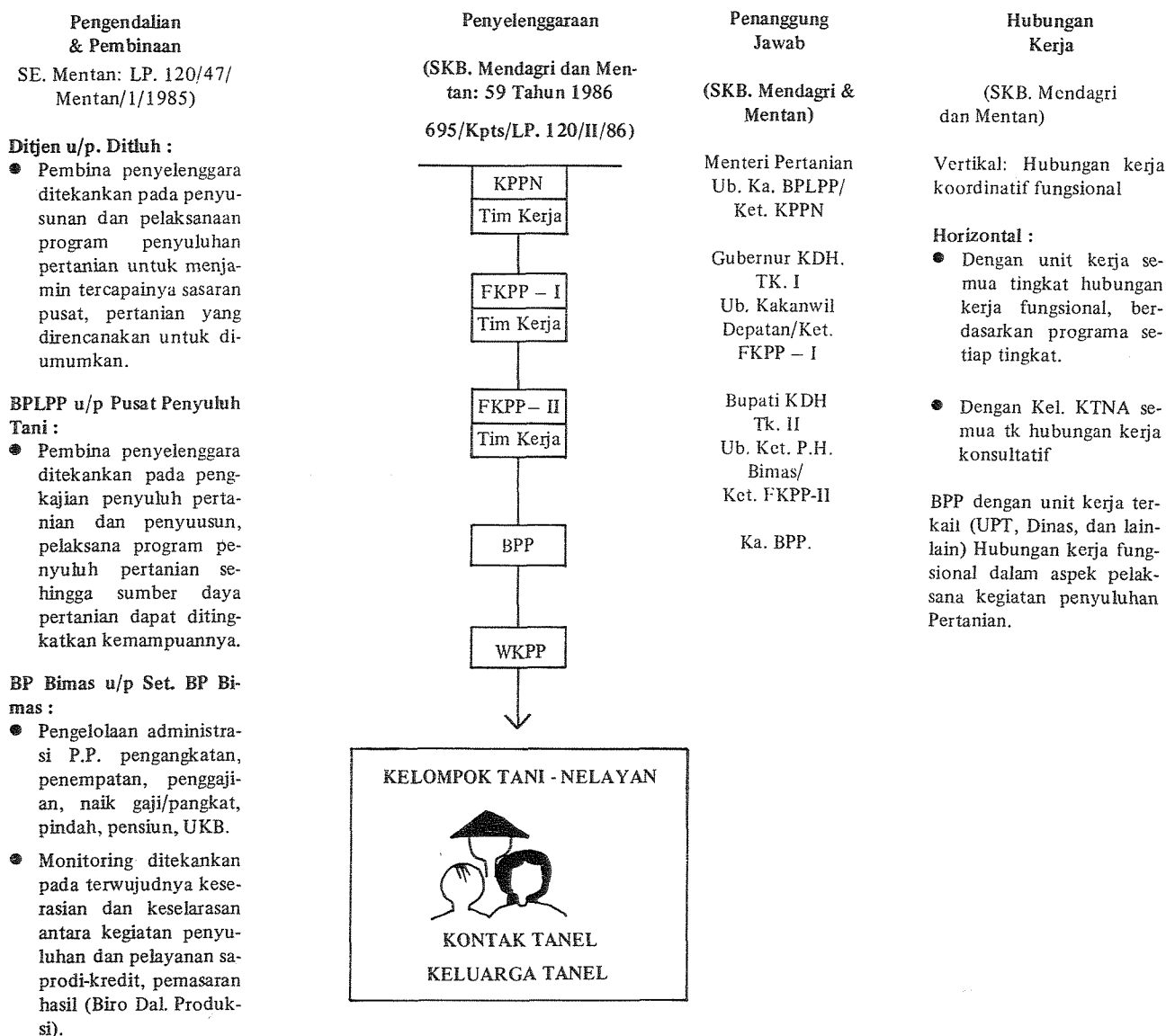
KOMENTAR

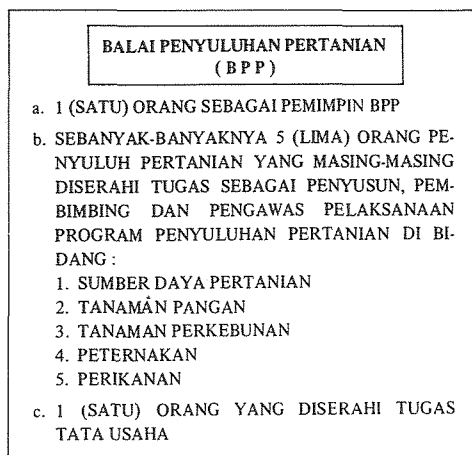
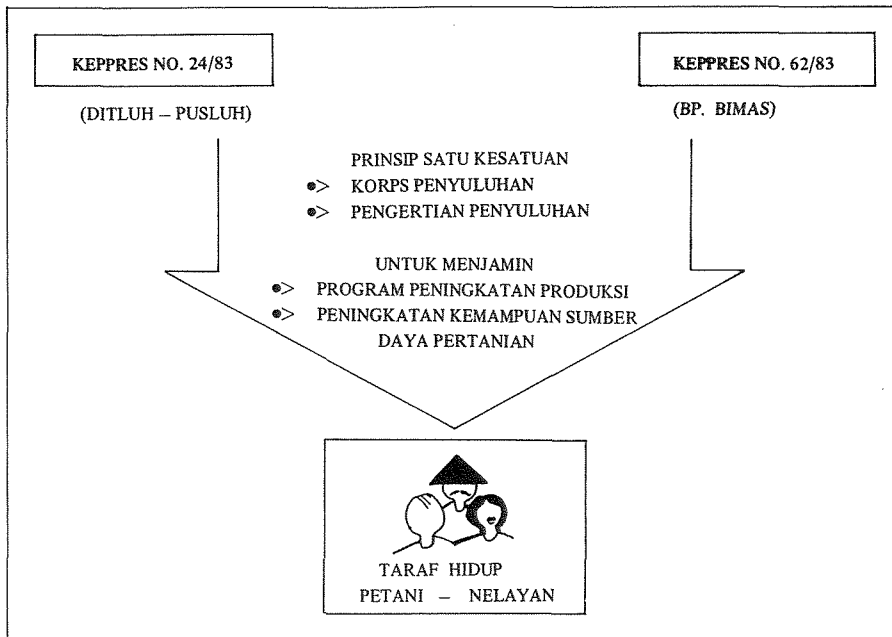
Soemartono Sosrtomarsono :

Mengenai komentar *Prof. Gunawan Satari*, saya mempunyai "workshop recommendation" dari FAO Brown Plant Hopper Workshop di Yogya. Sudah saya teliti lagi bahwa rekomendasi tentang hukuman petani yang menanam varitas rentan itu tidak ada di rekomendasi workshop.

Waktu participants workshop melakukan fieldtrip di daerah Klaten ada pertanyaan mengenai hukuman tersebut dari petugas setempat dan dijawab oleh participants dari Malaysia yang mengatakan bahwa hukuman itu tidak baik, perlu dimotivasi saja. Waktu itu saya menjadi interpreter.

PENYELENGGARAAN & HUBUNGAN KERJA PENYULUHAN PERTANIAN





**PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN PERTANIAN DI TINGKAT LAPANGAN.**

